

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Variabel ini dianalisis secara deskriptif dan variabel yang dianalisis terdiri dari satu variabel yakni implementasi program. Ini bertujuan untuk menjawab bagaimana implementasi program dan faktor apa saja yang berpengaruh. Analisis implementasi program didefinisikan sebagai suatu kebijakan pemerintah dengan menyediakan sarana merenovasi rumah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan indikator Organisasi, Interpretasi dan Penerapan, dengan menggunakan aspek adanya koordinasi dalam program, pengawasan dalam program, pembagian tugas, pemahaman terhadap rencana program, pemahaman program bantuan, kepatuhan, partisipasi masyarakat, dan kualitas bangunan rumah.

5.1.1 Penyajian Data Tabel 5.1

Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi Program

No. Responden	No. Pertanyaan								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	2	2	3	2	2	4	3	20
2	2	2	2	3	2	3	3	4	21
3	2	2	2	3	2	2	4	3	20

4	4	3	3	4	3	4	5	4	30
5	4	4	3	3	3	4	5	4	30
6	2	2	2	2	2	2	4	4	20
7	2	3	2	2	2	2	3	2	18
8	3	2	2	2	2	2	2	3	18
9	2	3	2	2	2	2	2	3	18
10	2	2	2	3	2	2	2	2	17
11	2	2	2	2	2	3	3	2	18
12	2	3	2	2	2	2	2	2	17
13	2	2	2	2	2	2	3	3	18
14	2	2	2	3	3	2	2	2	18
15	3	2	2	2	2	3	2	2	18
16	2	3	2	2	2	2	3	2	18
17	2	2	4	3	3	2	2	3	21
18	2	2	4	2	3	3	2	2	20
19	3	2	2	3	2	2	2	2	18
20	2	2	2	2	3	2	2	3	18
21	2	2	2	2	2	2	3	2	17
22	3	2	2	3	4	2	2	3	21
23	2	3	3	2	2	4	2	2	20
24	2	2	2	2	3	4	2	3	20
25	2	2	2	2	2	2	3	3	18

26	2	2	2	3	3	2	2	4	20
27	3	2	3	2	2	4	2	2	20
28	2	4	2	3	2	3	2	3	21
29	2	2	3	2	2	4	2	3	20
30	3	2	3	2	2	2	3	4	21
Σ	70	70	70	73	70	77	80	85	594

5.1.2 Klasifikasi Penilaian

Untuk keperluan pemahaman data pada tabel diatas, maka ditetapkan kriteria penilain sebagai berikut:

1) Skor Tertinggi:

= Jumlah Responden x Nilai Tertinggi

= $30 \times 5 = 150$

2) Skor Terendah:

= Jumlah Responden x Nilai Terendah

= $30 \times 1 = 30$

3) Range Nilai

= $150 - 30 = 120$

Interval Nilai = $150/5 = 30$

4) Klasifikasi Penilaian

Sangat Baik : 87-100

Baik : 71-86

Cukup Baik	: 54-70
Tidak Baik	: 37-53
Sangat Tidak Baik	: 20-36

Berdasarkan data diatas dengan memperhatikan kriteria penilaian yang telah ditetapkan maka penerapan implementasi program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok dapat dijelaskan melalui indikator sebagai berikut:

5.2 Analisis Indikator

1. Analisis Organisasi

Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan.

Indikator uraian Organisasi dengan aspek yang diukur yaitu adanya koordinasi dalam program bantuan, adanya pengawasan dalam program bantuan, dan pembagian tugas dalam program bantuan.

- a) Aspek adanya koordinasi dalam pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni, ringkasan dalam koordinasi program secara keseluruhan memperoleh nilai 70 yang berada pada klasifikasi cukup baik, artinya koordinasi dalam pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni yang dirasakan oleh masyarakat cukup baik
- b) Aspek adanya pengawasan dalam program bantuan rumah tidak layak huni memperoleh nilai 70. Nilai ini berada pada klasifikasi

baik, artinya selama dalam proses pembangunan bantuan rumah masyarakat mendapatkan dan merasakan adanya pengawasan dari pemerintah setempat, sehingga memberikan nilai yang baik.

- c) Aspek pembagian tugas dalam program bantuan rumah tidak layak huni, memperoleh nilai 70 berada pada klasifikasi cukup baik, artinya dalam pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni uraian pembagian tugas secara rinci tidak jelaskan dengan sehingga masyarakat kurang memahami.

Berdasarkan ketiga aspek yang diukur tersebut, maka indikator uraian Organisasi dengan aspek adanya koordinasi, adanya pengawasan, dan pembagian tugas, yang diuraikan secara keseluruhan menunjukkan bahwa indikator Organisasi dengan ketiga aspek tersebut memperoleh nilai rata-rata $70 \left(\frac{70+70+70}{3} \right)$. Nilai ini berada pada klasifikasi cukup baik (54- 70) artinya para masyarakat di Desa Lewokluok cukup baik diberikan gambaran tentang koordinasi dalam program bantuan rumah, pengawasan dalam program bantuan rumah, dan pembagian tugas dalam program bantuan rumah tidak layak huni.

Dari analisis diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Lin Open salah satu masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni mengatakan bahwa:

“Dalam proses pembangunan bantuan rumah tidak layak huni ada koordinasi dari pemerintah, dan juga ada pengawasan, namun

pemerintah tidak terlalu rutin untuk melakukan koordinasi dan pengawasan, serta pembagian tugas juga yang tidak jelas”. Hal ini yang membuat masyarakat memberikan nilai yang cukup baik.
(Wawancara, 3 Juli 2019)

Dari hasil observasi yang dilakukan dalam pembangunan bantuan rumah tidak layak huni diketahui masih kurang koordinasi, dan pengawasan, serta pembagian tugas yang masih kurang baik dalam pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni masyarakat.

2. Analisa Interpretasi

Interpretasi merupakan penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh saran kebijakan interpretasi menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima masyarakat serta dilaksanakan. Indikator interpretasi dengan uraian aspek yaitu pemahaman terhadap rencana program bantuan rumah tidak layak huni, dan pemahaman program bantuan melalui sosialisasi program rumah tidak layak huni.

- a) Aspek pemahaman terhadap rencana program bantuan rumah tidak layak huni, memperoleh nilai 73 berada pada klasifikasi baik, artinya masyarakat di Desa Lewokluok memahami program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni.

b) Aspek pemahaman program bantuan melalui sosialisasi program rumah tidak layak huni, dan memperoleh nilai 70 berada pada klasifikasi cukup baik, artinya masyarakat di Desa Lewokluok kurang mendapatkan pemahaman mengenai program bantuan rumah tidak layak huni karna tidak ada pemahaman yang diberikan melaui sosialisasi program bantuan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan kedua aspek yang diukur tersebut, maka indikator uraian interpretasi dengan aspek pemahaman terhadap rencana program bantuan rumah tidak layak huni, dan pemahaman program bantuan melalui sosialisasi program rumah tidak layak huni, yang diuraikan secara keseluruhan menunjukkan bahwa indikator interpretasi memperoleh nilai 71,5 ($\frac{73+70}{2}$). Nilai ini berada pada klasifikasi baik (71-86) artinya masyarakat di Desa Lewokluok pemahaman masyarakat terhadap program bantuan rumah tidak layak huni baik namun perlu diadakan lagi sosialisasi karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat kepada masyarakat.

Dari hasil analisis diatas diperkuat dengan hasil wawancara kepada salah satu masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok, menurut pendapat ibu Lin Open bahwa:

“sebelum melakukan proses pembangunan rumah ini kami cuma diberikan penjelasan sedikit dari tim pendamping mengenai dana bantuan yang diberikan kepada kami keluarga dalam bentuk barang untuk pembangunan rumah namun untuk sosialisasi kepada kami msyarakat tidak ada sosialisasi”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Wis Lein mengatakan bahwa *“program bantuan ini diberikan kepada kami sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah namun kami masih belum memahami program bantuan ini karena tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada kami masyarakat”.*

(Wawancara, 3 Juli 2019)

Hasil observasi yang dilakukan masyarakat di Desa Lewokluok sudah mulai memahami program bantuan rumah tidak layak huni namun sebelum program bantuan itu diberikan kepada masyarakat masih kurang diadakan sosialisasi secara umum kepada masyarakat.

3. Analisis Penerapan

Penerapan merupakan peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Indikator penerapan diuraikan dengan aspek yaitu kepatuhan proses dalam pembangunan rumah tidak layak huni, partisipasi masarakat dalam pembangunan rumah tidak ayak huni, dan kualitas bangunan rumah tidak layak huni.

- a) Aspek kepatuhan proses dalam pembangunan rumah tidak layak huni, memperoleh nilai 77 berada pada klasifikasi baik, artinya kepatuhan proses dalam pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok masyarakat mematuhi proses dalam pembangunan rumah sehingga pelaksanaan pembangunan rumah tidak tepat waktu.
- b) Aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah tidak layak huni, memperoleh nilai 80 berada pada klasifikasi baik artinya partisipasi masyarakat Desa Lewokluok dalam proses pembangunan rumah mendapat partisipasi yang baik dan diterima oleh masyarakat.
- c) Aspek kualitas bangunan rumah tidak layak huni, memperoleh nilai 85 dan berada pada klasifikasi penilaian baik, artinya rumah yang ditempati masyarakat sebelumnya yang tidak layak dan kemudian direnovasi menjadi rumah yang layak untuk dihuni dengan kualitas rumah yang tahan lama dan nyaman untuk dihuni anggota keluarga masyarakat.

Berdasarkan penerapan yang diuraikan dalam aspek kepatuhan proses, partisipasi masyarakat, dan kalitas bangunan rumah tidak layak huni, memperoleh nilai rata-rata $80,6 \left(\frac{77+80+85}{3} \right)$. Nilai ini berada pada klasifikasi baik (71-86) artinya penerapan pembangunan bantuan rumah di Desa Lewokluok mulai maksimal sesuai uraian masyarakat mematuhi proses dalam pembangunan, dan juga ada partisipasi baik dari masyarakat dan pembangunan bantuan rumah tidak layak huni yang layak sesuai kehidupan masyarakat. Dari hasil analisis diatas diperkuat dengan hasil wawancara Ibu Lin Open mengatakan bahwa:

“kami mematuhi proses pembangunan rumah, dan partisipasi dari masyarakat setempat juga membantu kami dalam bentuk bergotong royong sehingga rumah kami yang dikatakan tidak layak ditempati namun kualitas rumah kami kini sudah layak untuk ditempati”.

(Wawancara, 3 Juli 2019)

Dari hasil observasi yang dilakukan masyarakat di desa Lewokluok masih cukup mematuhi proses dalam pembangunan rumah walaupun masyarakat disibukan juga dengan kegiatan umum di desa dan juga berkebun. Partisipasi dari masyarakat baik dengan ikut membantu pembangunan rumah dan kualitas pembangunan rumah juga lebih layak untuk ditempati oleh masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan nilai disetiap indikator dari variabel Implementasi Program Bantuan rumah Tidak Layak Huni di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur memperoleh nilai sebesar 74,03 ($\frac{70+71,5+80,6}{3}$) nilai ini menunjukkan bahwa Implementasi program rumah tidak layak huni di desa Lewokluok berada pada klasifikasi baik dalam arti dengan adanya program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Desa Lewokluok dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, dapat meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam hal ini dengan melihat beberapa aspek diatas dalam pembangunan program rumah tidak layak huni kualitas rumah dilihat dalam pembangunan diupayakan untuk mewujudkan rumah yang lebih layak dan memenuhi kriteria rumah layak huni untuk ditempati masyarakat yang menerima program bantuan rumah tidak layak huni. Hal ini diungkapkan lewat wawancara dengan Ibu Yudit Ina Tulit, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Flores Timur, Beliau mengatakan bahwa:

''Pemberian bantuan dalam program pembangunan rumah tidak layak huni kepada pihak masyarakat penerima program bantuan ini menerima bantuan dalam bentuk barang dan sebelum ditentukan masyarakat yang menerima program bantuan ini terlebih dahulu diidentifikasi siapa yang lebih membutuhkan dari bantuan ini dan program bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahteraa dan kualitas pembangunan rumah

juga diperhatikan agar memenuhi standar atau kriteria rumah layak huni baik dalam segi sosial maupun segi kesehatan bagi masyarakat''.

(Wawancara, 5 Juli 2019)

5.3 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Lewokluok

Dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok, yaitu peran pemerintah dan peran masyarakat dalam pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Peran Pemerintah

Adapun peran pemerinah dalam pembangunan program rumah tidak layak huni ini, sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Sosialisasi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan sebelum melakukan suatu program bantuan kepada masyarakat. Dalam pembangunan program rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pembangunan rumah tidak layak huni. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Klaus Goran, Beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum pembangunan rumah ini dilakukan juga tidak ada sosilisasi kepada kami masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak

huni, kami diberikan penjelasan sedikit mengenai dana yang diberikan itu juga dilakukan disetiap rumah masyarakat yang menerima program bantuan rumah tidak layak huni”.

(Wawancara, 3 Juli 2019)

b) Koordinasi Dan Pengawasan

Pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok juga masih kurang koordinasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan program rumah tidak layak huni ini. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Klaus Goran selaku masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni, Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan rumah kami ini kurang ada bahkan tidak ada koordinasi dan pengawasan dari pemerintah setempat untuk datang melihat pembangunan rumah kami”.

(Wawancara, 3 Juli 2019)

c) Pembagian Tugas

Dalam pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok juga jarang ada pembagian tugas yang jelas dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara dengan Bapak Petrus Kerowe Lein selaku Kepala Desa Lewokluok, mengatakan bahwa:

“Saya sebagai pemerintah desa merasa berterimah kasih dengan adanya program bantuan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Lewokluok yang berpenghasilan rendah dengan kualitas rumah yang

dibangun lebih layak untuk ditempati dan meningkatkan kehidupan masyarakat dalam perekonomian dan kesehatan, namun dalam pembangunan rumah tidak ada pembagian tugas yang jelas, dimana tidak melibatkan pihak dari pemerintah desa. Pembagian tugas dari pihak pemerintah Kabupaten Dinas Perumahan dan langsung kepada masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni.

(Wawancara, 5 Juli 2019)

2. Peran Masyarakat

a) Kepatuhan dalam Pembangunan rumah

Dalam pembangunan rumah tidak layak huni kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembangunan rumah masih belum mematuhi hal ini disebabkan karena masyarakat sibuk dengan kegiatan lain yang membuat pembangunan rumah tidak berjalan dengan baik. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara dengan Bapak Klaus Goran, mengatakan bahwa;

“Dalam pembangunan rumah kami masih belum terlalu mematuhi agar pengerjaan rumah ini cepat selesai hal ini disebabkan karena kami kadang sibuk dengan pekerjaan lain sehingga membuat penundaan dalam melakukan pembangunan rumah ini”.

(Wawancara, 3 Juli 2019)